

# POLICY BRIEF

## “Kesuksesan Melawan Dengue: Kunci Manajemen dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)”

Annisa Zahara : Cici Yuliza Putri : Dewi Nurlita : Firmanda Danang : Gladys LK

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki endemisitas tinggi untuk dengue. Pada akhir tahun 2022, jumlah kasus dengue di Indonesia mencapai 143.000 kasus, incidence rate dengue nasional 52/100.000 penduduk, kejadian luar biasa (KLB) terjadi tidak hanya pada Provinsi dengan angka kasus dengue yang tinggi tetapi juga pada Provinsi dengan beban dengue yang rendah, angka bebas jentik (ABJ) belum tercapai (<95%). Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sebagai salah satu upaya pengendalian vector untuk intervensi pencegahan telah dilakukan namun belum cukup efektif untuk mengendalikan kasus dengue. Dengan melakukan penguatan manajemen program PSN diharapkan mampu meningkatkan efektifitas program PSN dalam pengendalian dengue.

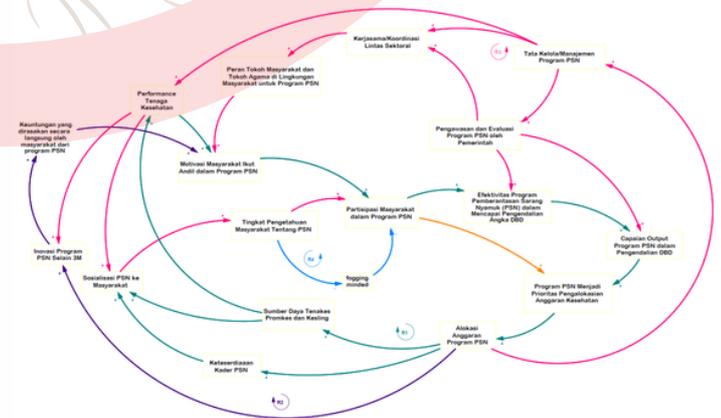
Namun, pada kenyataannya, incidence rate dengue pada akhir tahun 2022 masih melebihi target. Selain itu, selama periode 2016-2020, selalu terdapat kejadian luar biasa (KLB) dengue setiap tahunnya. Angka kematian akibat dengue juga masih tinggi. Pada tahun 2020, terdapat 7 provinsi dan 186 kabupaten/kota yang memiliki angka kematian akibat dengue melebihi target nasional (1%). Menanggapi hal ini, pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenkes 2020-2024 berkomitmen untuk mengendalikan dengue. Salah satu program yang saat ini dilakukan yaitu Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Melalui program ini diharapkan Angka Bebas Jentik (ABJ) rumah tangga sebesar  $\geq 95\%$ . Namun, program ini belum efektif karena ABJ rumah tangga Indonesia masih dibawah standar. Tata kelola atau manajemen berkaitan dengan pengaturan sumber daya, baik anggaran maupun manusia, serta pengawasan dan evaluasi yang belum berjalan dengan optimal menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program PSN (lihat gambar 1).

### TARGET PENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Indonesia
2. Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Indonesia
3. Puskesmas se-Indonesia
4. Pemerintah Kelurahan atau Desa se-Indonesia
5. Lintas Sektoral (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab/Kota se-Indonesia, Organisasi Masyarakat Setempat)

### PERNYATAAN MASALAH

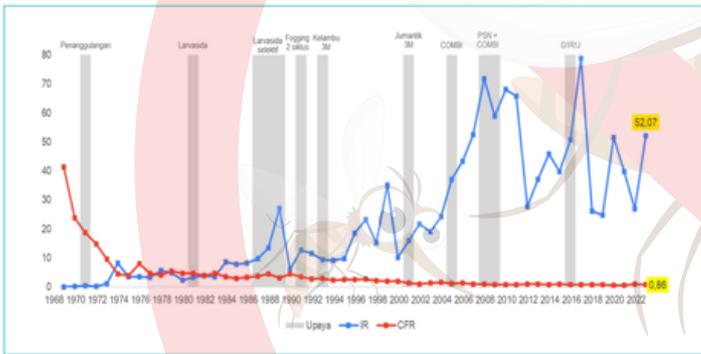
Dengue sudah lama dikenal sebagai salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan menargetkan 90% kabupaten/kota di Indonesia memiliki angka kejadian (incidence rate) dengue  $\leq 49/100.000$  penduduk. ,



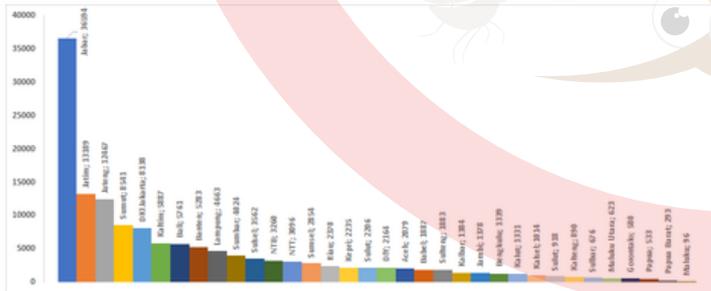
Gambar 1. Causal Loop Diagram

## UKURAN MASALAH

Dari tahun 1968 hingga 2022, angka insidensi dengue di Indonesia terus mengalami peningkatan dan masih melebihi target yaitu 52/100.000 penduduk. Pada akhir tahun 2022 jumlah kasus dengue di Indonesia mencapai 143.000 kasus, dengan angka kejadian dengue terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, angka fatalitas kasus dengue mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk segera berobat jika mengalami gejala dengue. Namun, angka fatalitas kasus dengue di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara Kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang memiliki angka fatalitas kasus dibawah 0,5%. (lihat grafik 1 dan 2).



Grifik 1. Angka Insidensi dan Fatalitas Kasus Dengue di Indonesia 1968-2022 (Kemenkes, 2023)



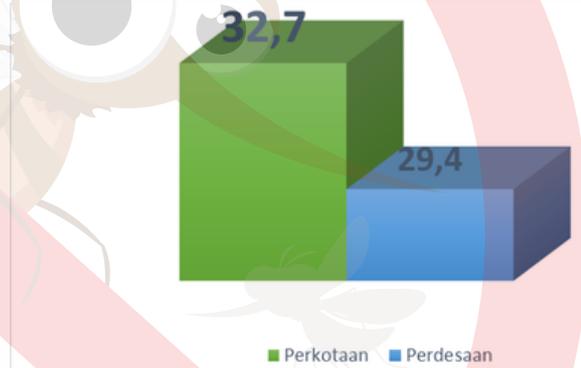
Grifik 2. Sebaran Kasus Dengue Kumulatif Per Provinsi di Indonesia Tahun 2022 (Kemenkes, 2023)

Angka insidensi dengue yang terus meningkat sangat disayangkan, mengingat sudah terdapat upaya pemerintah untuk mengendalikan dengue melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Namun, proporsi PSN di Indonesia masih relatif rendah, yaitu sebesar 31,2%

dengan Provinsi Kepulauan Riau memiliki proporsi terendah yaitu 16,2%. Persentase rumah tangga yang melakukan PSN hanya 29,4% di perdesaan dan 32,7% di Perkotan. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan PSN baik di desa maupun di kota masih belum optimal dilakukan (lihat grafik 3 dan 4).

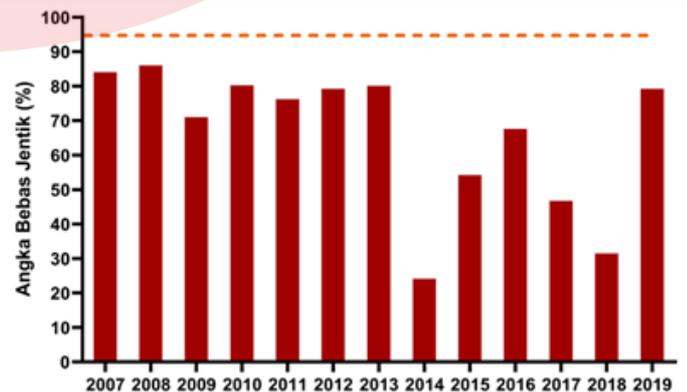


Grifik 3. Proporsi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan di Rumah Tangga menurut Provinsi Tahun 2018 (Riskesdas, 2018)



Grifik 4. Proporsi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan di Rumah Tangga menurut Wilayah Tahun 2018 (Riskesdas, 2018)

Imbas dari kegiatan PSN yang belum berjalan optimal terlihat dari data yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, standar baku mutu angka bebas jentik (ABJ) masih belum tercapai secara nasional (lihat grafik 5)



Grifik 5. Capaian Standar Baku Mutu Angka Bebas Jentik Beberapa Periode (Kemenkes, 2020)

## FAKTOR PENYEBAB

Faktor penyebab program PSN belum berjalan efektif disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu manajemen program PSN yang belum optimal. Apabila ditinjau dari fungsinya, maka permasalahan manajemen program PSN terletak pada *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* (POAC) yang akan dijelaskan dibawah ini.

### 1. Planning (Perencanaan)

Penanggulangan dengue belum menjadi prioritas sebagian besar pemerintah daerah (Kemenkes, 2020). Hal ini berpengaruh dalam perencanaan program PSN di bagian alokasi anggaran dan SDM. Anggaran program PSN dapat berasal dari APBN dan dana BOK. Menurut (Fauzi, 2018) anggaran dan personal untuk program PSN masih kurang. Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program PSN tidak mencukupi (Aprilia, 2023). Selain itu perlu penambahan tenaga untuk turun ke lapangan dalam menjalankan program PSN. Ketersediaan dana mempengaruhi staf yang bekerja di lapangan dan mayoritas SDM belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai DBD (Widodo, 2021)

### 2. Organizing (Pengorganisasian)

Dalam pengorganisasian, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu struktur organisasi, dimana tugas dan tanggung jawab serta komunikasi mempengaruhi keberhasilan akan program PSN sendiri. Situasi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak terlaksananya Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD tingkat Kabupaten dan Penyuluhan penanggulangan DBD (Fauzi, 2018). Ternyata semua petugas program P2DBD memiliki tugas rangkap, kondisi ini mempengaruhi kualitas kerja serta menghambat pencapaian program PSN di Kabupaten Sleman (Ningsih, 2019). Keberhasilan penanggulangan dengue ini memerlukan peran, dukungan, dan komitmen multisektor, tetapi dilapangan keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor, lintas program, dan kemitraan masih terbatas (Kemenkes, 2020).

### 3. Actuating (Pelaksanaan)

Tim yang terlibat terdiri dari kepala dinas dan kepala badan, tetapi tim tersebut tidak berfungsi secara maksimal, padahal harus mengkampanyekan program PSN di kecamatan (Fauzi, 2018). Tidak efektifitasnya program PSN juga dipengaruhi Kurangnya sosialisasi dari pihak Puskesmas terkait penatalaksanaan kasus DBD. Kemudian dana yang disediakan hanya untuk uang transportasi petugas DBD dan surveilans, sedangkan dana honor kader jumantik sudah lama tidak ada (Aprilia et al., 2023). Selain itu hasil laporan sering terlambat dikirim ke Puskesmas karena kader jumantik tidak disiplin (Fратиwi et al., 2023).

### 4. Controlling (Pengendalian)

Dalam meningkatkan ke efektifan program PSN ini dibutuhkan pengawasan, akan tetapi di lapangan ditemukan bahwa Pengawasan pada kegiatan kader jumantik tidaklah rutin setiap hari selasa dan jumat, pengawasan dilakukan petugas kesehatan dengan keliling berdasarkan jadwal (Fратиwi et al., 2023). Supervisi juga tidak dilakukan karena keterbatasan dana dan sumber daya karena pelaksana program DBD di puskesmas memiliki tugas lain. Kegiatan pengawasan meliputi evaluasi terhadap rencana kerja yang difokuskan pada analisa situasi, perumusan masalah dan penentuan target hasil kegiatan serta penyusunan laporan (Ningsih, 2019).

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 1. Penguatan komitmen Pemerintah

**Daerah Kab/Kota**, khususnya daerah yang memiliki incidence rate diatas target, melalui penyusunan strategi daerah untuk penanggulangan dengue. Strategi daerah merupakan upaya bersama pemerintah daerah untuk menguatkan komitmen dan pendanaan program PSN melalui APBD, pemerintah kelurahan/desa, swasta, filantropi, dan lainnya. Diharapkan melalui penguatan ini setiap daerah mampu mendukung program PSN.

## 2. Penguatan manajemen program PSN dengan dukungan sistem kesehatan.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Organisasi Masyarakat merumuskan struktur organisasi program, sarana dan prasarana program serta alat kesehatan pendukung untuk penguatan implementasi program PSN. Kemudian aspek manajemen SDM harus ditingkatkan melalui pelatihan. Diharapkan dengan manajemen program yang baik dapat mendukung sistem pencatatan dan pelaporan program PSN dengan lengkap dan tepat waktu.

## 3. Penguatan komitmen Pemerintah Kelurahan/Desa,

melalui Musrembang Kelurahan/Desa untuk memasukkan program PSN sebagai rencana kerja tahunan yang merancang anggaran, alur koordinasi yang konsisten antara Pemerintah Kelurahan/Desa, Puskesmas dan masyarakat sampai sanksi yang berlaku apabila ditemukan jentik nyamuk di rumah masyarakat.

## 4. Peningkatan kolaborasi lintas sektor,

dengan mengidentifikasi aktor yang dapat terlibat seperti DP3PM dan Ormas. Melalui kolaborasi ini diharapkan meningkatkan ketersediaan SDM di masyarakat, misalnya ibu-ibu PKK dan pemuda setempat yang dapat berperan untuk membantu pelaksanaan dan pengendalian program PSN.

## 5. Mengadakan "JUMPA TAMU (Jum'at Pagi Tanpa Nyamuk)",

sebagai hari peringatan setiap bulan untuk melakukan bersih - bersih sarang nyamuk serta pengawasan dan pemantauan jentik nyamuk di Kelurahan/Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, N., Misnaniarti, & Novrikasari. (2023). Evaluasi Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue Model CIPP. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6, 1701-1716. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.6006>

Fauzi, M., & Winarni, F. (2020). Efektivitas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Melalui Gertak Psn Di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul. *Journal of Public Policy*, 7(3), 443-457. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/12691>

Kemendes RI. (2021). Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021-2025. In Kementrian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). Membuka Lembaran Baru Laporan Tahunan 2022 Demam Berdarah Dengue. In Laporan Tahunan 2022 Demam Berdarah Dengue.

Ningsih, D. P. sulistiya. (2019). Evaluasi Program Kesehatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2Dbd) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.35842/formil.v4i1.228>

Pratiwi, L., & Febriyanty, D. (2023). Gambaran Implementasi Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik Berkala Pada Program Pencegahan Infeksi Dengue. *Journal of Comprehensive Science*, 2(1), 177-388. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

Widodo, M. D., & Putra, B. E. (2020). Analisis Sumber Daya Program Penanggulangan Kabupaten Rokan Hulu. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 14-19.



**KELOLA PROGRAM  
PEMBERANTASAN  
SARANG NYAMUK**

**3M  
PLUS**

- Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Meningkatkan manajemen program PSN dengan dukungan sistem kesehatan
- Meningkatkan komitmen Pemerintah Kelurahan/Desa,
- Kolaborasi lintas sektor
- "JUMPA TAMU (Jum'at Pagi Tanpa Nyamuk)"